

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984, hlm..34.
- Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta
- Habib Adjie, *Sekilas dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- , *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008
- , *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Surabaya, 2007
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P&K, Jakarta, 1990
- Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar serta Peraturan Pemerintah R.I No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaannya*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 166
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014,
- , *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta :SinarGrafika, 2008
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Prof. Subekti, S.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, cet. 31, Jakarta, 2003

Retnowulan S dan Iskandar O, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, C.V . Mandar Maju, Bandung 2005

Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007

Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk, dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* , Jakarta, 200

-----, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung

Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Sjaifuracchman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012

Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008

Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006

Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2008

Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, Bandung, CV Vilawa, 2013

Yahya harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, jakarta, 2003

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 7

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, 2006, *Teori Hukum Murni Nuasa dan Nusa Media*, Bandung
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1988, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Phillipus M. Hadjon, 1986, *Makalah Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya,
- Indroharto, *usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soerjono Soekanto (b), 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia, UI-Press
- Johnny Ibrahim, 2010, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang
- Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Renika Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Riato Ali, 2004, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Granit, Jakarta
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligitasi*, Kencana, Jakarta
- Djamanat Samosir, 2011, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung
- Hartati Sulihandari, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. RemajaRosda Karya, Bandung

Muchtar Kusumaatmadja dan Arief b, Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Buku 1, Bandung,

R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cet 12, Bandung

B. Jurnal/Tesis/Web-site

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 20 Maret 2023

Fredy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesi, hlm 15., dalam <http://www.gipi.or.id> di akses pada tanggal 1 Mei 2023

I Komang Gede Oka Wijaya, “*Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1, 2017, hlm. 38

Sudut Hukum, 2016, *Dasar Pertimbangan Hakim*, <http://www.suduthukum.com/2016/11/dasar-pertimbangan-hakim.html/>, diakses pada tanggal 21 Maret 2023

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/pembuktian-di-muka-persidangan/>

<https://lawindonesia.wordpress.com/hukum-islam/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

